

Peran Jurnalisme Watchdog Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah: Media Sebagai Agen Perubahan Sosial Di Era Teknologi Digital

Alfiansyah Rahman¹⁾, Ahmad Dimyati²⁾

^{1,2)}Universitas Pamulang

Email korespondensi: alfiansyahrahman19717@gmail.com; dosen01703@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran jurnalisme watchdog dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta kontribusi media massa sebagai agen perubahan sosial di era teknologi digital. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini bersumber dari dokumentasi, observasi, dan wawancara dalam kegiatan seminar jurusan Ilmu Komunikasi, dengan materi yang mencakup sejarah media, etika bermedia, dan keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurnalisme watchdog berfungsi sebagai kontrol independen yang mampu mengawasi kekuasaan publik, mendorong transparansi, dan memberikan ruang edukatif bagi masyarakat untuk memahami isu-isu kebijakan secara kritis. Dalam konteks digital, media memperluas partisipasi publik dan membentuk identitas sosial melalui praktik narasi, peliputan berbasis data, serta distribusi konten lintas platform. Teori-teori agenda setting dan literasi media menguatkan temuan bahwa media memiliki kapasitas untuk menentukan isu-isu penting, sekaligus mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat. Literasi digital dan etika bermedia menjadi syarat krusial dalam menjaga akurasi informasi serta meningkatkan partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini merekomendasikan penguatan etika jurnalistik, kolaborasi antara regulator dan institusi media, serta peningkatan literasi digital sebagai strategi pengembangan media yang kredibel dan demokratis.

Kata Kunci : Watchdog Journalism, Akuntabilitas, Media Digital, Partisipasi Publik, Literasi Media.

PENDAHULUAN

Media massa merupakan agen utama dalam penyebaran informasi sekaligus pemegang peran sentral dalam sistem demokrasi modern. Ia tidak hanya bertugas menyampaikan berita, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui praktik watchdog journalism, yakni pengawasan independen terhadap kekuasaan publik. Dalam masyarakat demokratis, media yang bebas turut menjaga arus informasi, memfasilitasi debat publik, serta memberikan ruang bagi berbagai kelompok sosial untuk menyampaikan pandangannya (Felle, 2015). Transformasi besar dalam produksi dan konsumsi informasi di era digital telah memperkuat peran media, terutama dengan hadirnya media sosial yang memungkinkan setiap individu menjadi kreator konten (Барлыбаева, 2019). Dalam konteks ini, literasi media menjadi semakin krusial untuk menghadapi kompleksitas informasi dan risiko penyebaran narasi palsu (Aykut Ozel, 2025). Praktik jurnalisme data, yang kini berkembang pesat, menjadi strategi penting untuk menginvestigasi isu-isu publik dan meminta pertanggungjawaban lembaga negara melalui pendekatan berbasis bukti.

Media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan. Pemberitaan investigatif menjadi simbol keberanian media dalam mengungkap kebenaran demi kepentingan publik, sekaligus memperlihatkan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi kinerja pemerintah. Dengan isi pemberitaan yang kuat dan berbasis data, media memunculkan kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi serta partisipasi dalam menuntut akuntabilitas institusi negara. Dalam pembangunan demokrasi dan penguatan institusi, media tampil sebagai pendidik publik yang berfungsi mengedukasi warga tentang hak-hak sipil mereka. Media mengorganisir opini publik, membangun kesadaran kolektif, dan mendorong gerakan sosial menuju perubahan kebijakan atau reformasi kelembagaan. Kredibilitas informasi yang disampaikan menjadi prasyarat bagi pembangunan yang transparan, adil, dan partisipatif.

Di sisi lain, media juga memainkan peran sebagai agen perubahan budaya. Melalui konstruksi narasi dan pengaturan isu, media membentuk nilai-nilai sosial dan mendorong dialog antarbudaya (Al-Badri, 2023). Jurnalisme yang menekankan dimensi emosi turut memengaruhi persepsi budaya dan identitas masyarakat (Albin, 2007; Hafiz et al., 2021). Meski demikian, praktik media juga berisiko memperkuat ideologi yang memecah belah, sehingga diperlukan tanggung jawab etis agar tetap inklusif dan konstruktif.

Perkembangan media digital membuka ruang bagi ekspresi dan partisipasi yang lebih luas. Media sosial, khususnya, membentuk identitas digital dan komunitas global maupun lokal (Çöteli, 2019), meski juga berpotensi menciptakan homogenisasi dan mengaburkan nilai tradisional (Elijah, 2016). Namun, platform digital juga berperan dalam pelestarian budaya lokal dengan menyediakan wadah untuk komunitas mengekspresikan identitasnya secara global. Komunitas seperti Buja Bali dan Paguyuban Kridho Laras Karawitan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan tradisi, meningkatkan kebanggaan budaya, dan memperkuat solidaritas berbasis digital (Jati, 2019; Prasetyo Jati, 2022). Perangkat digital seperti smartphone telah menjadi bagian integral dalam rutinitas harian individu, menghubungkan mereka dengan isu-isu lokal, nasional, dan global, sekaligus memperluas partisipasi warga dalam wacana sosial dan politik (Fahri Adnan et al., 2025). Media digital kini memainkan peran penting dalam membentuk identitas, memperkuat keterlibatan komunitas, serta menjadi sarana utama dalam membangun jejaring sosial.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada transformasi mendalam yang terjadi dalam ekosistem informasi akibat kemajuan teknologi digital. Perubahan drastis dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi telah menjadikan media digital sebagai aktor sentral dalam kehidupan politik dan sosial. Media sosial telah memperluas partisipasi warga, mengubah peran masyarakat dari konsumen pasif menjadi produsen konten aktif, yang berdampak langsung terhadap dinamika komunikasi, pembentukan identitas sosial, serta peningkatan keterlibatan publik dalam isu-isu pemerintahan.

Di tengah arus informasi yang masif dan tak terkontrol, praktik jurnalisme watchdog menjadi krusial sebagai mekanisme pengawasan independen terhadap kekuasaan publik. Jurnalisme ini tidak hanya menyampaikan informasi berbasis data, tetapi juga berperan dalam mendorong transparansi, meminta pertanggungjawaban pemerintah, serta memantik kesadaran publik untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Namun, tantangan seperti penyebaran misinformasi, bias algoritmik, dan polarisasi politik turut mengaburkan fungsi kontrol sosial media jika tidak diimbangi dengan praktik jurnalistik yang etis dan profesional.

Sebagai agen perubahan sosial, media memainkan peran strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan, membentuk opini publik, dan memfasilitasi gerakan sosial. Di era digital, media juga berperan dalam pelestarian budaya lokal dan pembentukan identitas digital melalui narasi inklusif dan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam kontribusi jurnalisme watchdog dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah, serta memahami peran media sebagai agen transformasi sosial yang adaptif, etis, dan demokratis di era teknologi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Agenda Setting

Teori *agenda setting* menjelaskan bagaimana media massa memiliki kemampuan untuk membentuk prioritas isu dalam benak masyarakat. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw, yang menyatakan bahwa media dapat mentransfer elemen yang dianggap penting dari *news agenda* ke dalam *public agenda*. Dalam praktiknya, media berperan membentuk persepsi masyarakat tentang apa yang sepatutnya dianggap penting dan layak diperhatikan (Nuruddin, 2007).

Selanjutnya, Bernard C. Cohen menambahkan bahwa media tidak selalu berhasil memberitahu publik apa yang harus mereka pikirkan, tetapi mampu mengarahkan mereka untuk

memikirkan isu-isu tertentu. Media, menurutnya, memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran publik melalui penekanan informasi dan penyajian isu yang dianggap penting (Baran & Dennis, 2007).

Senada dengan itu, Stephan W. Littlejohn dan Karen A. Foss menekankan bahwa proses pembentukan agenda dimulai dari pemilihan isu oleh media, yang secara selektif menentukan berita apa yang layak disampaikan kepada publik. Dalam kapasitasnya sebagai penjaga gerbang informasi (*gatekeeper*), media berperan menyaring dan membingkai informasi, sehingga apa yang diketahui oleh masyarakat pada waktu tertentu sangat dipengaruhi oleh pilihan liputan media (Littlejohn & Foss, 2009).

Sementara itu, Syukur Kholil mengutip pendapat Samsudin A. Rahim yang menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan signifikan untuk memengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Melalui pengaturan agenda terhadap isu-isu yang dipandang penting, media turut membentuk orientasi publik terhadap realitas sosial (Kholil, 2007).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori *agenda setting* menyoroti peran penting media dalam mengarahkan perhatian publik dan membentuk konstruksi sosial tentang apa yang patut dipahami dan didiskusikan. Informasi yang disampaikan oleh media tidak hanya menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi membentuk kebiasaan, opini, bahkan gaya hidup masyarakat melalui dominasi wacana yang terus-menerus dihadirkan.

2. Teori Watchdog Journalism

Media menjadi salah satu hal yang hampir dimiliki oleh seluruh dunia. Media bisa menjadi salah satu tempat untuk memberitakan sesuatu agar masyarakat atau individu bisa mendapatkan berita yang terbaru dan terkini sehingga masyarakat juga bisa aware dengan apa yang sedang terjadi di negaranya. Dalam teori watchdog journalism, media menjadi salah satu alat independen untuk mengawasi pergerakan pemerintah. Dalam hal ini, media berfungsi untuk memberikan informasi untuk masyarakat agar praktik-praktik kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh pemerintah bisa dicegah dan demokrasi bisa tetap dijaga dalam lingkungan masyarakat (Romeltea, 2022). Watchdog journalism menjadi tanda bahwa pemerintah tidak bisa melakukan hal-hal seenaknya karena media menjadi alat pengawasan yang sangat berpengaruh. Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan yang semena-mena dan tidak

menyangkut kepentingan publik, media bisa mengantar berita tersebut dengan sangat cepat kepada masyarakat sehingga melalui media, masyarakat bisa membuat kegerakan-kegerakan untuk menghentikan pemerintah yang berlaku secara seenaknya. Watchdog Journalism sendiri memiliki antonim nya sendiri, yaitu Lapdog Journalism. Jurnalisme seperti ini lebih taat kepada penguasa dan selalu memberikan informasi yang diubah-ubah menyesuaikan dengan informasi yang diinginkan oleh penguasa karena penguasa mengatur jalannya media. Watchdog Journalism lebih memberikan fakta apa yang terjadi di jalan tanpa adanya kebiasaan terhadap pihak yang berkuasa.

Hal ini menjadi cara agar masyarakat tetap bisa memberikan kontrol kepada pemerintah. Watchdog Journalism sangat penting dimiliki oleh sebuah media, apalagi dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, karena media memiliki tugas untuk bisa memberikan informasi, mengecek fakta, dan investigasi terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang mungkin atau akan melakukan penyimpangan ketika mereka berkuasa. Media bisa mengambil peran untuk meminta tanggung jawab terhadap hal-hal yang pernah pejabat lakukan selama berkuasa pada suatu negara dan menjaga transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan yang sedang menjabat. Media seakan menjadi “intel” bagi masyarakat untuk memberikan berita-berita atau informasi-informasi tanpa masyarakat harus mencari taunya sendiri. Dengan watchdog journalism, supremasi sipil akan terjaga dengan baik dan demokrasi bisa tetap berjalan.

Berdasarkan salah satu artikel yang dibuat oleh J-Pal (e.d.), watchdog journalism ini mampu mendorong adanya perubahan dalam suatu daerah atau negara. Salah satu studi kasus yang dilakukan berada di Tanzania, peneliti dari J-pal mencoba meneliti sebuah daerah yang memiliki pelayanan publik yang cukup kurang dan peneliti mencoba menggunakan teori watchdog journalism untuk meningkatkan kerja pemerintah dengan memberikan pelayanan publik yang lebih. Hasilnya teori yang digunakan tersebut berhasil membuat pemerintah untuk bekerja lebih cepat menyediakan pelayananpelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat Tanzania.

3. Jurnalisme : Peran Pengawas dan Akuntabilitas Jurnalis

Jurnalis memiliki peran fundamental dalam memperkuat demokrasi, terutama melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas (watchdog), jurnalisme bertanggung jawab menyampaikan informasi yang akurat, kritis, dan objektif kepada publik terkait kebijakan serta kinerja pemerintah. Melalui peliputan investigatif

dan analisis mendalam, jurnalis tidak hanya menginformasikan masyarakat, tetapi juga mengedukasi mereka mengenai hak-hak sipil dan tanggung jawab warga negara.

Peran media sebagai penjaga transparansi semakin relevan di era digital, di mana arus informasi melimpah namun sering kali tidak tervalidasi. Media yang independen dan profesional dapat mendorong partisipasi publik dengan menyediakan wawasan berbasis data terhadap isu-isu kebijakan, sehingga masyarakat terlibat secara aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan (Vanacore et al., 2023).

Salah satu perkembangan penting dalam bidang ini adalah munculnya jurnalisme data, yang memperluas kapasitas investigatif jurnalis melalui pemanfaatan data numerik, perangkat lunak, dan visualisasi statistik. Data memungkinkan peliputan yang lebih kompleks terhadap isu-isu publik, serta memberi konteks dan makna yang lebih kaya bagi audiens. Meskipun penggunaan statistik dalam pelaporan bukan hal baru, tren ini kini semakin signifikan karena data dapat diperoleh dari beragam sumber, seperti instansi pemerintah, kantor berita, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam praktiknya, jurnalis bertindak sebagai narator yang menyusun informasi melalui berbagai format grafik, bagan, audio, video guna membantu publik memahami substansi berita secara komprehensif dan menyeluruh. Dengan pendekatan ini, jurnalisme tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi yang mendorong transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah (Krah & Mertens, 2020).

4. Media sebagai Agen Perubahan Sosial

Media memiliki peran vital dalam mendukung perubahan sosial dengan mengangkat isu-isu penting ke ruang publik. Castells (2012) menunjukkan bahwa media sosial mempercepat mobilisasi massa, seperti yang terlihat dalam peristiwa Arab Spring. Tufekci (2017) menambahkan bahwa media sosial mampu menurunkan hambatan partisipasi dalam gerakan sosial, memperluas jangkauan protes secara global. Bennett dan Segerberg (2012) memperkenalkan konsep "connective action", di mana media digital memungkinkan individu untuk terlibat dalam aksi kolektif tanpa harus melalui struktur organisasi tradisional.

5. Literasi Media Digital

Istilah "literasi" berasal dari bahasa Latin *litteratus* yang berarti "orang yang belajar" (*learned person*). Secara historis, literasi merujuk pada kemampuan dasar membaca, menulis,

dan berpikir secara kritis. Seiring perkembangan zaman, definisi tersebut mengalami perluasan. Richard Lanham (dalam Lankshear & Knobel, 2015) menyatakan bahwa literasi kini mencakup kemampuan memahami dan mengelola informasi yang disampaikan melalui berbagai media, baik media massa tradisional maupun media baru. Memasuki abad ke-21, kebutuhan akan literasi semakin kompleks. Syarifuddin (2023) mengidentifikasi enam bentuk literasi utama yang harus dimiliki masyarakat modern, yakni literasi baca tulis, numerasi, finansial, sains, digital, serta literasi budaya dan kewargaan. Literasi-literasi ini bukan hanya mencerminkan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kompetensi sosial dan kognitif yang relevan dalam berbagai konteks kehidupan.

Literasi digital, sebagai bagian penting dari literasi modern, merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi dalam format digital. Bawden (2001) menekankan bahwa literasi digital memiliki karakteristik berbeda dari literasi konvensional karena sumber informasinya sangat beragam, mencakup teks, gambar, audio, video, dan bentuk lainnya. Literasi digital tidak hanya menuntut kemampuan teknis seperti mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga kapasitas untuk berpikir kritis dan adaptif dalam menghadapi arus informasi yang kompleks. Pemerintah Alberta (2009) memperluas definisi literasi sebagai keterampilan yang melibatkan aspek pengetahuan, kompetensi, dan kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi efektif, memecahkan masalah, serta beradaptasi dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Literasi digital, dalam hal ini, menjadi instrumen penting untuk mengembangkan potensi individu dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat.

Menurut Eshet (2012), literasi digital mengharuskan pengguna untuk memiliki pengetahuan yang mencakup dimensi kognitif, motorik, sosial, dan emosional. Kemampuan ini tidak hanya dibutuhkan untuk menggunakan internet secara efektif, tetapi juga untuk menyeimbangkan interaksi interpersonal di dunia digital. Dengan demikian, literasi digital tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan teknis, melainkan juga dengan kemauan dan kapasitas untuk menavigasi ekosistem digital secara etis, kritis, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena keterbukaan media massa serta peran media sebagai agen perubahan sosial dalam konteks demokrasi digital. Metode ini tidak bertujuan untuk

menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan cermat mengenai kondisi yang diamati melalui pengalaman narasumber dan hasil kegiatan akademik.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. **Dokumentasi:** Peneliti mengumpulkan dokumen berupa materi seminar “Keterbukaan Media Massa Terhadap Publik” yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang. Materi yang disampaikan oleh narasumber menjadi dasar untuk menelusuri wacana keterbukaan media, peran jurnalistik, dan dinamika sosial yang dipengaruhi oleh media.
2. **Observasi:** Observasi dilakukan terhadap kegiatan seminar, termasuk interaksi peserta dan respons terhadap pemaparan yang disampaikan narasumber. Peneliti juga memperhatikan bagaimana narasi media dipahami dan dikontekstualisasikan oleh audiens akademik.
3. **Wawancara:** Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada peserta seminar untuk menggali pemahaman mereka terhadap tema keterbukaan media dan konsep “watchdog journalism” dalam mengawasi pemerintahan. Wawancara juga bertujuan mengidentifikasi sejauh mana mahasiswa melihat media sebagai agen perubahan sosial.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan **analisis tematik**, dengan mengekstraksi tema-tema utama dari pemaparan seminar dan tanggapan audiens. Tema seperti fungsi edukatif media, tanggung jawab etis jurnalis, struktur kontrol media, serta transformasi sosial melalui media digital menjadi fokus interpretasi. Proses analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran menyeluruh yang mendukung tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Jurnalisme Watchdog dalam Mendorong Transparansi Pemerintah

Hasil dokumentasi seminar menunjukkan bahwa konsep watchdog journalism dipahami sebagai bentuk kontrol independen terhadap kekuasaan yang bertujuan menjaga kepentingan publik. Narasumber, seperti Pak Elik, menggarisbawahi bahwa jurnalis memiliki tugas utama

untuk mengkritisi kebijakan, mengawasi penyalahgunaan wewenang, serta memastikan informasi publik disampaikan secara terbuka. Dalam pemaparan tentang sejarah media dari era kedai kopi hingga pasca-reformasi, terlihat bahwa praktik jurnalisme watchdog telah berkembang menjadi komponen vital dalam demokrasi, meskipun menghadapi tantangan seperti tekanan politik dan menurunnya kualitas pemberitaan.

Temuan ini sejalan dengan teori McCombs & Shaw (agenda setting), yang menunjukkan bahwa media mampu membentuk prioritas publik melalui penonjolan isu-isu penting. Dalam konteks ini, jurnalisme watchdog tidak hanya menyampaikan data, tetapi juga membentuk kesadaran publik terhadap isu akuntabilitas pemerintahan.

2. Media Digital dan Partisipasi Publik sebagai Agen Perubahan Sosial

Dari materi yang dipaparkan oleh Ms. Kiki, media digital digambarkan sebagai ruang terbuka yang memungkinkan pengguna berperan aktif sebagai produsen konten. Mahasiswa dan audiens akademik menyatakan bahwa mereka memandang media sebagai instrumen transformasi sosial yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat.

Konsep *agent of change* terlihat jelas dalam temuan observasi, di mana media dinilai memiliki peran edukatif, komunikatif, dan kontrol sosial yang kuat. Media tidak hanya menyampaikan wacana, tetapi juga merangsang partisipasi dan mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, media tradisional berfungsi sebagai penjaga pintu informasi, sementara media sosial memperluas akses dan memungkinkan narasi alternatif berkembang.

3. Tantangan Literasi Media dan Etika Digital di Era Teknologi

Etika bermedia menjadi poin penting dalam seminar, terutama dalam hal verifikasi informasi, penghormatan terhadap privasi, dan tanggung jawab atas jejak digital. Narasumber menekankan bahwa keterbukaan media tidak berarti tanpa batas, melainkan harus dibarengi dengan kesadaran etis dalam mengelola informasi.

Dari perspektif teoritis, literasi digital merupakan komponen krusial yang menggabungkan kompetensi teknis, kognitif, dan sosial (Eshet, 2012). Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa audiens memahami pentingnya memverifikasi informasi, menghindari

bias, dan menggunakan media untuk menyuarakan kebenaran. Hal ini mendukung peran media dalam membentuk identitas publik yang kritis dan partisipatif.

4. Jurnalisme Data sebagai Penguatan Praktik Investigatif

Pemanfaatan data dalam praktik jurnalisme menguatkan posisi media dalam menyampaikan isu-isu strategis secara objektif dan terukur. Baik melalui grafik, visualisasi, maupun analisis statistik, jurnalis tidak lagi hanya bertindak sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai penyaji konteks dan penafsir realitas publik.

Sebagaimana dipaparkan dalam seminar, penggunaan data dari institusi seperti pemerintah, LSM, dan lembaga riset memungkinkan jurnalisme menjadi sarana kontrol sosial yang lebih tajam. Penelitian ini menemukan bahwa jurnalisme data meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas karena transparansi sumber dan teknik peliputan yang berbasis bukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa jurnalisme watchdog memainkan peran krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah, terutama di era teknologi digital yang sarat akan informasi instan dan partisipasi publik yang tinggi. Melalui praktik investigatif dan penyajian data yang kredibel, jurnalis berfungsi sebagai penjaga kepentingan publik serta fasilitator kesadaran demokratis.

Media digital telah memperluas peran jurnalisme dalam membentuk opini publik dan mendorong keterlibatan masyarakat. Konsep media sebagai *agent of change* tercermin dalam cara media menyampaikan wacana, mendorong transformasi sosial, dan mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawabnya.

Namun, tantangan seperti penyebaran misinformasi, etika dalam bermedia, serta penurunan kualitas liputan tetap menjadi perhatian utama. Literasi digital dan etika jurnalisme menjadi syarat mutlak agar media tetap menjadi kekuatan progresif yang mendukung demokrasi, bukan sekadar saluran informasi yang rentan manipulasi.

Saran

1. Peningkatan literasi media public pemerintah institusi pendidikan, dan media perlu memperluas program literasi media digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang akurat dan etis serta tidak terjebak dalam misinformasi.
2. Penguatan etika jurnalistik dan transparansi intitusi media harus terus mendorong pelatihan etika dan jurnalisme berbasis data agar praktik watchdog tetap berorientasi pada kepentingan publik dan bukan sekadar sensasionalisme.
3. Kolaborasi media regulator dan akademisi diperlukan sinergi antara media, regulator (seperti Dewan Pers dan KPI), serta komunitas akademik untuk mengembangkan standar mutu peliputan serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik.
4. Pengembangan media alternatif sebagai ruang dialog inklusif Media komunitas dan platform lokal dapat menjadi ruang yang relevan bagi penyebaran informasi berbasis budaya dan nilai lokal, sekaligus memperluas partisipasi warga dalam proses demokrasi.
5. Pemanfaatan teknologi untuk praktik investigatif berbasis bukti jurnalis perlu terus memanfaatkan teknologi analisis data, visualisasi, dan AI untuk menghasilkan peliputan yang faktual, transparan, dan mudah diakses oleh publik luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jean Burgess & Edward Hurcombe (2019) Digital Journalism as Symptom, Response, and Agent of Change in the Platformed Media Environment. *Digital Journalism* 7(3): 359-367.
- Sadia Jamil (2019): Increasing Accountability Using Data Journalism: Challenges for the Pakistani Journalists, *Journalism Practice*.
- Fauzan, M., Purwanto, E., Jupri, H. D. N., & Dewi, P. S. (2025). Media sebagai Agen Perubahan Komunitas di Era Teknologi Digital. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi Digital*, 2(4), 15-15.
- Lestari, R. D. (2020). Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial (Studi pada Akun Instagram@ tempodotco dan@ tribunjogja)(Digital Journalism and The Ethics of Social Media Journalism (Study in the Instagram Account@ tempodotco and@ tribunjogja)). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(2), 159-174.
- Kadir, A., Usman, A., & Imam, S. (2024). Eksaminasi Peran Media Lokal dalam Komunikasi Politik Pilkada Serentak 2024: Studi Kasus di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 29-42.

- Rahmayanti, H. D., & Ambarini, T. K. (2025). Pengaruh Self-Control Terhadap Perilaku Doomscrolling yang Dimediasi oleh Psychological Distress Pada Emerging Adulthood Pengguna Media Sosial TikTok. *Repository Perpustakaan Universitas Airlangga*.
- J-Pal. (e.d.). Impact of Watchdog Journalism on Public Service Provision in Tanzania.
- Zai, A. B. P., Pratama, I. C., Miliano, R., & Al Furqan, S. (2025). Pemberitaan media sebagai pengawas dalam mewujudkan institusi yang transparan dan akuntabel di Indonesia sesuai SDG 16 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jawa Timur.
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori agenda setting dalam ilmu komunikasi. *Jurnal Simbolika Research and Learning In Communication Study*, 4(1), 32-41.
- Nabilah, J. (2024). *Manajemen Redaksional Lembaga Pers Mahasiswa pada Pemberitaan Kasus Desa Wadas (Studi Deskriptif pada LPM Balairung UGM dan LPM Ekspresi UNY)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ndraha, A. B., Waruwu, E., Zebua, D., & Zega, A. (2024). Kebijakan kelembagaan kehumasan dan jurnalistik untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 1(2), 23-31.